



PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN CATURHARJO

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Kalurahan Caturharjo yang disusun secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kalurahan perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijakan pembangunan Kalurahan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 dengan Peraturan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Caturharjo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja

kalurahan yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.

7. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2021 – 2026

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Caturharjo Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
 - BAB III : POTENSI DAN MASALAH
 - BAB IV : VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
 - BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) Sistematika RPJMKal Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal);
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan pada tahun yang bersangkutan.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi, misi dan program prioritas RPJMKal dimaksudkan sebagai panduan sistematis untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa;
- (2) Visi Kalurahan Caturharjo adalah “Terwujudnya masyarakat Caturharjo yang sehat, tertib, sejahtera, cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia”.

Pasal 5

Misi Kalurahan Caturharjo dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo;
- b. Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan lesejahteraan warga kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata;
- d. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo;
- e. Melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo;
- f. Meningkatkan iman dan taqwa warga kalurahan Caturharjo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan program maupun kebijakan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 30 Maret 2021
LURAH CATURHARJO,

ttd

WASDIYANTO

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 30 Maret 2021
CARIK CATURHARJO,

ttd

DIMAS SATRIO WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3

Noreg. Peraturan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul (05/Caturharjo/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. Carik Caturharjo
Kepala Urusan Pangripta

WIWIN RIYANTI, SP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 78 UU Kalurahan mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kalurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kalurahan dimaksud meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut pasal 79 mengatur bahwa pemerintah kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMKal paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten serta rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan berskala kalurahan.

RPJMKal disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Kalurahan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Kalurahan. Kondisi objektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain Keadilan gender, Kelindungan terhadap anak, Pemberdayaan keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, Warga disabilitas dan marginal, Pelestarian lingkungan hidup, Pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya local, Pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Caturharjo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan

peraturan Kalurahan Caturharjo Penyusunan arah kebijakan pembangunan pembangunan Kalurahan Caturharjo telah didasarkan melalui pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan kalurahan. Penyusunannya telah diselaraskan dan dikonsepkan untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developments goals/SDGs) kalurahan yang telah diberlakukan secara nasional.

Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat gambaran umum kalurahan, pandangan atau kebijakan umum, strategi pembangunan kalurahan serta program dan kegiatan pembangunan masyarakat dan kalurahan. Masa 6 (enam) tahun ini dihitung sejak tanggal dan tahun pelantikan sampai akhir masa jabatan Lurah. Dokumen ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan kalurahan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam periode jabatannya.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 – 2026 ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384) yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 16. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Tahun 13 Nomor 2020).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 -2026 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) setiap tahun.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

D. Proses Penyusunan RPJMKal

Proses penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 – 2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal

Tim Penyusun RPJMKal Kalurahan Caturharjo Tahun 2020 – 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penunjukan tim penyusun rencana pemerintah jangka menengah kalurahan. Adapun susunan Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dimas Satrio Wibowo, M.M.	Perangkat Kalurahan	Ketua
2	Nugraha	LKM kalurahan	Sekretaris
3	Wiwin Riyanti, SP	Perangkat Kalurahan	Anggota
4	Ratnadi Sedyatmo, SP	Perangkat Kalurahan	Anggota
5	Wiwid Yoan F	Perangkat Kalurahan	Anggota
6	Bunjamin, A. Md	Perangkat Kalurahan	Anggota
7	Siti Wakhidah	TP-PKK	Anggota
8	Latifah Mei Arumsari, S. Tr. keb	Perangkat Kalurahan	Anggota
9	Eko Muryanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	Sabani, S. Pd. I	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	Devita Ariani, SH	Tokoh Perempuan	Anggota

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan.

3. Pengkajian Keadaaan Kalurahan

Pengkajian keadaan kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan data kalurahan
- b. Penggalan gagasan masyarakat, dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.

4. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian desa terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.

5. Penyusunan rancangan RPJMKal

Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan.

6. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal.

7. Penetapan RPJMKal

Rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan kalurahan.

E. Hubungan RPJMKal Kalurahan Caturharjo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen RPJMKal Kalurahan Caturharjo disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Pandak sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMKal akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) yang akan disusun setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa jabatan Lurah.

F. Sistematika Penulisan RPJMKal Kalurahan Caturharjo

Sistematika penulisan RPJMKal Kalurahan Caturharjo adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB IX : PENUTUP

G. Penggunaan Istilah

Dalam Dokumen RPJMKal Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 - 2026 ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan beruapa rencanarencana program yang dibiayai dengan uang desa. dalam APBKal berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Des adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan dokumen RPJMKal Kalurahan Caturharjo Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan bagi penyusunan RPJMKal yang didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan

Desa Caturharjo adalah salah satu desa dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Caturharjo berada pada 12 Km dari Kota Kabupaten Bantul arah barat daya dan merupakan desa ujung paling selatan di Kecamatan Pandak.

Pada mulanya Desa Caturharjo terbentuk dari 4 Kalurahan (Kring) yaitu :

1. Kalurahan Gluntung.

Kalurahan ini meliputi pedukuhan Banyuurip, Gluntung Lor dan Gluntung Kidul dengan Lurah MARTO WIHARJO.

2. Kalurahan Tunjungan.

Kalurahan ini meliputi pedukuhan Gumulan, Tegalsempu dan Tunjungan dengan Lurah SURATNUN.

3. Kalurahan Tegallayang.

Kalurahan ini meliputi pedukuhan Krapakan, Samparan, Tegallayang Kulon dan Tegallayang Wetan dengan Lurah SASTRO DIHARJO.

4. Kalurahan Glagahan.

Kalurahan ini meliputi pedukuhan Kuroboyong, Korowelang, Glagahan dan Bogem dengan Lurah MANGUN KARIYO

Selanjutnya pada bulan Oktober Tahun 1946 dari 4 (empat) kalurahan / kring tersebut digabung menjadi 1 (satu) Kalurahan dengan nama CATURHARJO. Sebagai Lurah pertama setelah terjadinya penggabungan adalah SASTRO DIHARJO. Dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-harinya pada waktu itu karena belum mempunyai kantor sendiri menempati rumah salah satu warga yaitu rumah Bp. MENTO DIMEJO di Pedukuhan Tegalsempu, selanjutnya pindah di rumah Bp. MARTO SEDO di Pedukuhan Glagahan. Setelah memiliki kantor sendiri maka dalam menjalankan roda pemerintahannya pindah ke Kantor yang baru pada tahun 1952.

Kalurahan Caturharjo merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Caturharjo memiliki luas wilayah 580.7664 ha yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 14 (empat belas) pedukuhan dan 77 rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Kalurahan Caturharjo

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)	% Luas
1	Banyuurip	4	31	5.28
2	Gluntung Lor	5	87	14.82
3	Gluntung Kidul	4	29	4.94
4	Gumulan	10	84	14.31
5	Tegalsempu	4	27	4.60
6	Tunjungan	10	60	10.22
7	Krapakan	4	27	4.60
8	Samparan	4	19	3.24
9	Tegallayang 09	4	47	8.01
10	Tegallayang 10	6	45	7.67
11	Kuroboyo	7	35	5.96
12	Korowelang	5	17	2.90
13	Glagahan	4	29	4.94
14	Bogem	6	50	8.52

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Wilayah Kalurahan Caturharjo terletak di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Srandakan dan Desa Triharjo
- Sebelah timur : Kecamatan Bambanglipuro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanden
- Sebelah Barat : Kecamatan Srandakan

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Caturharjo telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh

lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Prestasi dan penghargaan yang pernah diperoleh adalah:

Tabel 2.2. Jenis Prestasi dan Penghargaan Dari Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1	UP2K PKK 1 Tingkat Kabupaten Bantul	2018
2	Peringkat 2 lomba kebersihan kantor Pemerintah desa tingkat Kecamatan	2018
3	Peringkat 13 Lomba Desa Kabupaten Bantul	2019
4	Peringkat IV PAAR TP-PKK kabupaten Bantul	2018
5	Peringkat V lomba LPMD tingkat Kabupaten Bantul	2019
	DLL	

2. Penggunaan Lahan/tanah

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Caturharjo Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pemggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya, baik untuk permukiman maupun fungsi lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020 adalah:

- a. Tanah sawah : 197.3980 Ha
- b. Tanah pekarangan/tanah kering : 294.3210 Ha
- c. Lain-lain : 89.0474 Ha

Penggunaan lahan selama tahun 2018 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kalurahan
Tahun 2018 – 2020

No	PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%
1.	Sawah	197.3980	34	197.3980	34	197.3980	34

2.	Tanah pekarangan /tanah kering	294.3210	51	294.3210	51	294.3210	51
3	Lain-lain	89.0474	15	89.0474	15	89.0474	15
	Jumlah	580.7664		580.7664		580.7664	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) tidak dapat diketahui adanya konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya karena data tidak diperbaharui selama 3 tahun terakhir.

B. Kondisi Demografi/Kependudukan

Kalurahan Caturharjo terletak di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada bulan januari tahun 2021, jumlah penduduk Kalurahan Caturharjo sebanyak 12.593 jiwa yang tersebar di 14 pedukuhan dan 77 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 6247 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6346 jiwa.

1. Jumlah penduduk menurut wilayah dan gender

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banyuurip	318	366	684
2	Gluntung Lor	323	332	655
3	Gluntung Kidul	307	312	619

4	Gumulan	891	863	1754
5	Tegalsempu	421	395	816
6	Tunjungan	606	617	1223
7	Krapakan	471	504	975
8	Samparan	320	320	640
9	Tegallayang 09	533	514	1047
10	Tegallayang 10	631	648	1279
11	Kuroboyo	434	433	867
12	Korowelang	249	278	527
13	Glagahan	381	351	732
14	Bogem	362	413	775
	Jumlah	6247	6346	12593

Sumber : Data monografi Tahun 2021 (bulan januari)

Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 6247 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6346 jiwa.

2. Jumlah penduduk menurut wilayah dan umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2018 tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<1	117	108	225
2-5	222	198	420
5-9	430	393	823
10-14	395	349	744
15-19	433	427	860
20-24	411	358	769
25-30	402	389	791
30-34	412	415	827
35-39	428	419	847
40-44	395	360	755
45-49	428	444	872
50-54	422	432	854
55-59	384	382	766

60-64	298	312	610
65-69	206	192	398
70-74	121	162	283
75+	300	403	703
Total	5804	6207	12011

Sumber : Data Disdukcapil Kab. Bantul (2018)

Berdasarkan data monografi diatas, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk terbesar Kalurahan Caturharjo adalah kelompok umur produktif (15-19 tahun) sebanyak 860 jiwa atau sebesar 7,4 % dan penduduk pada kelompok umur (20-24 tahun) sebanyak 769 jiwa atau sebesar 6,7 %. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebanyak 610 jiwa atau sebesar 5,3 %. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut jumlah penduduk non-produktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk dalam semua klasifikasi umur diupayakan akan mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Caturahrjo

3. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Caturharjo. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2018 tercantum dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Caturharjo Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
BELUM TIDAK SEKOLAH	991	1040	2031
BELUM TAMAT SD	405	377	782
TAMAT SD	1383	1493	2876
TAMAT SMP	885	780	1665

TAMAT SMA	1753	1562	3315
DIPLOMA I/II	34	54	88
DIPLOMA III	75	102	177
SRATA I	263	326	589
SRATA II	18	10	28
SRATA III	0	1	1
Total	5807	5808	11615

Sumber : Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 2 Tahun 2018

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

4. Jumlah penduduk per kilometer persegi

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan tingkat penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Jumlah kepadatan penduduk geografis Kalurahan Caturharjo ditunjukkan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Per Kilometer Persegi di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Padukuhan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Banyuurip	31	684	22
2	Gluntung Lor	87	655	8
3	Gluntung Kidul	29	619	21
4	Gumulan	84	1754	21
5	Tegalsempu	27	816	30
6	Tunjungan	60	1223	20
7	Krapakan	27	975	36
8	Samparan	19	'640	34
9	Tegallayang 09	47	1047	22
10	Tegallayang 10	45	1279	28
11	Kuroboyoyo	35	867	25
12	Korowelang	17	527	31

13	Glagahan	29	732	25
14	Bogem	50	775	16

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Secara umum penyebaran penduduk di Kalurahan Caturharjo tidak merata, pedukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi adalah pedukuhan Caturharjo yang meliputi Pedukuhan Krapakan sebesar 36 jiwa/Ha, Pedukuhan Samparan sebesar 34 jiwa/Ha dan Pedukuhan Korowelang sebanyak 31 jiwa/Ha. sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Pedukuhan Gluntung Lor sebesar 8 jiwa/Ha.

C. Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk, gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan di atas, data jumlah keluarga atau KK (kepala keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	KK	KK Perempuan
1	Banyuurip	31	684	229	11
2	Gluntung Lor	87	655	230	18
3	Gluntung Kidul	29	619	194	15
4	Gumulan	84	1754	514	69
5	Tegalsempu	27	816	225	20
6	Tunjungan	60	1223	343	49
7	Krapakan	27	975	252	15
8	Samparan	19	640	180	8
9	Tegallayang 09	47	1047	353	32
10	Tegallayang 10	45	1279	398	35
11	Kuroboyo	35	867	269	21
12	Korowelang	17	527	179	18
13	Glagahan	29	732	199	10
14	Bogem	50	775	225	18
	Jumlah		12593	3790	339

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Gumulan sebanyak 514 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Korowelang sebanyak 189 KK.

D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB

PUS (Pasangan Usia Subur) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2020 jumlah keluarga berdasarkan PUS (pasangan usia subur) dan Akseptor KB di Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Menurut PUS dan Akseptor KB di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Kelurga PUS	Jumlah Keluarga Akseptor KB	% Capaian Target %
1	Banyuurip	31	110	74	67,27
2	Gluntung Lor	87	81	62	76,54
3	Gluntung Kidul	29	87	69	79,31
4	Gumulan	84	215	156	72,55
5	Tegalsempu	27	80	47	58,75
6	Tunjungan	60	151	120	79,47
7	Krapakan	27	118	79	66,94
8	Samparan	19	70	48	68,57
9	Tegallayang 09	47	138	110	79,71
10	Tegallayang 10	45	194	126	64,94
11	Kuroboyo	35	112	100	89,28
12	Korowelang	17	61	52	85,24
13	Glagahan	29	83	46	55,42
14	Bogem	50	109	74	67,88
	Jumlah		1609	1163	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Cakupan sasaran usia 15 (lima belas)) tahun merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB Aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), serta untuk menjaga kelangsungan ber-KB. maka dilakukan pembinaan oleh para kader IMP terhadap masyarakat khususnya yang masih PUS.

Berdasarkan data PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kalurahan Caturharjo tahun 2020, jumlah PUS yang paling banyak terdapat di Pedukuhan Gumulan sebanyak 215 jiwa dan yang terendah di Pedukuhan Korowelang sebanyak 61 jiwa). Prosentase capaian target jumlah PUS yang ikut menjadi peserta KB Aktif yang paling tinggi adalah Pedukuhan Kuroboyo

sebesar 89,28 %), sedangkan yang paling rendah adalah Pedukuhan Glagahan sebesar 55,42 %).

E. Angkatan Kerja

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Caturharjo cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Merujuk pada data ketenagakerjaan tahun 2019 angka pengangguran di Kalurahan Caturharjo mencapai 6 %. Upaya yang telah dilakukan untuk megurangi angka pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Desa Caturharjo dan lain-lain. Dengan adanya unit usaha BUMDes yang berdiri sejak tahun 2018 diharapkan dapat menampung tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal Kalurahan Caturharjo

1. Jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10: Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Kerja di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Desa	10-14	15-19	20-24	25-39	40-54	55 keatas
1	Caturharjo	744	860	769	2465	2481	2760

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja (usia produktif), ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

2. Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11: Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Desa	PNS/TNI /Polri	Wira-swasta	Petani	Buruh	Buruh Tani	Pensiunan	Pemulung	Lain-lain
1	Caturharjo	323	1105	84	1532	2098	158	-	-

Sumber : Data disdukcapil tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2020, mata pencaharian penduduk sebagian besar didominasi sebagai buruh/buruh tani dan wiraswasta atau pedagang.

F. Keadaaan Sosial

Profil keadaan sosial berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

1. Agama

Menurut data disdukcapil tahun 2018 jumlah penduduk Kalurahan Caturharjo yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk masing-masing pedukuhan menurut jenis agama dapat ditunjukkan pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.12: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kepercayaan
	Caturharjo	11.491	19	53	-	-	-

Sumber : Data disdukcapil Tahun 2019

2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan-pedukuhan se-Kalurahan Caturharjo Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Caturharjo ada 28 yang terdiri dari 14 posyandu balita dan 14 posyandu lansia. Adapun daftar posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13: Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1	Banyuurip	Ada	Ada
2	Gluntung Lor	Ada	Ada
3	Gluntung Kidul	Ada	Ada

4	Gumulan	Ada	Ada
5	Tegalsempu	Ada	Ada
6	Tunjungan	Ada	Ada
7	Krapakan	Ada	Ada
8	Samparan	Ada	Ada
9	Tegallayang 09	Ada	Ada
10	Tegallayang 10	Ada	Ada
11	Kuroboyo	Ada	Ada
12	Korowelang	Ada	Ada
13	Glagahan	Ada	Ada
14	Bogem	Ada	Ada

Sumber : Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2020 di Kalurahan Caturharjo terdapat 1 bayi meninggal dari Banyu urip. Dibandingkan tahun 2019 jumlah kematian bayi tidak ada bayi meninggal. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14: Jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Caturharjo Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Pedukuhan	2019		2020	
		AKB	AKI	AKB	AKI
1	Banyuurip	-	-	1	-
2	Gluntung Lor	-	-	-	-
3	Gluntung Kidul	-	-	-	-
4	Gumulan	-	-	-	-
5	Tegalsempu	-	-	-	-
6	Tunjungan	-	-	-	-
7	Krapakan	-	-	-	-
8	Samparan	-	-	-	-
9	Tegallayang 09	-	-	-	-
10	Tegallayang 10	-	-	-	-
11	Kuroboyo	-	-	-	-
12	Korowelang	-	-	-	-
13	Glagahan	-	-	-	-
14	Bogem	-	-	-	-

Sumber : Data Puskesmas Pandak II

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Caturharjo antara lain :

- a. Pemberian Kartu KIA bagi ibu hamil yang rentan ekonomi

- b. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- c. Pemberian bantuan biaya pemeriksaan dan persalinan bagi ibu hamil beresiko tinggi.
- d. Bekerjasama dengan Puskesmas Pandak II melaksanakan kegiatan KP Ibu.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Kalurahan Caturharjo bekerja sama dengan Puskesmas Pandak II melakukan pendampingan, serta melalui APBDes memberikan bantuan. Penanganan gizi buruk ini juga diselaraskan dengan penanganan stunting di Kalurahan Caturharjo Data bayi stunting di Kalurahan Caturharjo sampai akhir tahun 2020 adalah:

Tabel 2.15: Jumlah Balita Stunting dan Gizi Buruk di Kalurahan Caturharjo Sampai Akhir Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Balita	Kondisi Balita		Klasifikasi Keberadan Pendek/Balita terindikasi stunting
			Pendek	Normal	
1	Banyuurip	56	3	53	Sedang
2	Giluntung Lor	34	2	32	Sedang
3	Giluntung Kidul	53	4	49	Sedang
4	Gumulan	111	5	106	Tinggi
5	Tegalsempu	32	0	32	Rendah
6	Tunjungan	70	8	62	Tinggi
7	Krapakan	48	1	47	Rendah
8	Samparan	35	1	34	Rendah
9	Tegallayang 9	76	0	76	Rendah
10	Tegallayang 10	76	9	67	Tinggi
11	Kuroboyo	56	5	51	Tinggi
12	Korowelang	35	0	35	Rendah
13	Glagahan	38	2	36	Sedang
14	Bogem	48	0	48	Rendah
Jumlah		768	40	728	

Sumber Data: Pendataan Kader Stunting, 2021

3. Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis penyakit

Jumlah angka kesakitan atau kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 per pedukuhan se-Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.17: Jumlah penderita DBD tahun 2015 – 2020 di Kalurahan Caturharjo

No	Pedukuhan	2015	2016	2017	2018	20019	2020
1	Banyuurip	-	-	-	-	-	-
2	Gluntung Lor	-	-	-	-	-	1
3	Gluntung Kidul	-	-	1	-	-	-
4	Gumulan	-	4	2	-	2	-
5	Tegalsempu	-	-	-	-	-	-
6	Tunjungan	-	-	2	-	1	-
7	Krapakan	1	1	-	-	-	-
8	Samparan	-	1	-	-	-	-
9	Tegallayang 09	-	3	-	-	1	-
10	Tegallayang 10	7	-	-	-	-	3
11	Kuroboyo	2	-	-	-	-	-
12	Korowelang						
13	Glagahan	-	3	-	-	2	2
14	Bogem	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data hasil pendataan Puskesmas Pandak II

Angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 5 kasus. Penurunan ini merupakan keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan DBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Caturharjo dan masyarakat yang bekerjasama dengan Muspika serta Puskesmas Pandak II Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) yang melibatkan seluruh jajaran Muspika, Fogging focus, Penyuluhan kesehatan masyarakat, Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda).

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,-. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Caturharjo pada tahun 2019 – 2020 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18: Jumlah ART Miskin Kalurahan Caturharjo Tahun 2019 – 2020

No	Tahun	Jumlah ART	Jumlah ART Miskin	Prosentase
1	2019	12613	6863	54.41
2	2020	12599	6227	49.42

Sumber : data TKPKD 2019– 2020

Pada akhir tahun 2020 jumlah KK miskin di masing-masing wilayah pedukuhan se-Kalurahan Caturharjo ditampilkan dalam tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19: Jumlah KK Miskin di Masing-Masing Pedukuhan se- Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1	Banyuurip	684	120	17.54
2	Gluntung Lor	655	148	22.60
3	Gluntung Kidul	619	110	17.77
4	Gumulan	1754	293	16.70
5	Tegalsempu	816	104	12.75
6	Tunjungan	1223	195	15.94
7	Krapakan	975	110	11.28
8	Samparan	640	62	9.69
9	Tegallayang 09	1047	173	16.52
10	Tegallayang 10	1279	201	15.72

11	Kuroboyo	867	123	14.19
12	Korowelang	527	87	16.51
13	Glagahan	732	135	18.44
14	Bogem	775	24	3.10

Sumber : Data DTPPFM Tahun 2020

Masalah utama di Kalurahan Caturharjo adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBKal Kalurahan Caturharjo serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ada stimulan bantuan material dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni sejumlah @ 5 unit.

4. Penyandang masalah sosial

Penyandang masalah sosial sering dihubungkan dengan warga penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) tahun 2021 meliputi masyarakat lansia terlantar, perempuan rawan social ekonomi, cacat fisik dan atau cacat mental. Perempuan Rawan Sosial ekonomi merupakan perempuan dimasa akan dating diprediksi mengalami masalah social. Lansia terlantar merupakan lansia yang tidak memiliki keluarga. Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. Pada tahun 2021 jumlah warga penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) tahun 2021 di wilayah pedukuhan se Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 2.20 sebagai berikut :

Tabel 2.20: Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (Pmks) Tahun 2021

No	Pedukuhan	Jumlah PMKS
1	Banyuurip	21
2	Gluntung Lor	34
3	Gluntung Kidul	30
4	Gumulan	27
5	Tegalsempu	21
6	Tunjungan	27
7	Krapakan	15
8	Samparan	17

9	Tegallayang 09	12
10	Tegallayang 10	30
11	Kuroboyo	17
12	Korowelang	21
13	Glagahan	13
14	Bogem	16

Sumber : Data hasil pendataan kader

G. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Caturharjo sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Caturharjo dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian pen dudukan, Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

1. Mata pencaharian penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data matapencaharian penduduk Kalurahan Caturharjo tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21: Jumlah Penduduk Berdasar Mata pencaharian Penduduk Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	267
2	Tentara Nasional Indonesia	21
3	Polisi RI	27
4	Pegawai Swasta	1.109
5	Wiraswasta/Pengusaha/Pedagang	1.206
6	Petani	1.994
7	Buruh Serabutan	1.669
9	Pensiunan	151
10	Nelayan	-
11	Pemulung	-
12	Jasa Lain	-
13	Lain-lain	213
	Jumlah	

Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2018

Pada akhir tahun 2018 mata pencaharian penduduk di Kalurahan Caturharjo sebagian besar didominasi di sektor swasta dan buruh.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh

kalurahan yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2015 – 2020 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Caturharjo Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2015 - 2020 tertuang dalam tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kalurahan Caturharjo
Tahun Anggaran 2015 – 2020

Uraian		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Desa		40.724.724	62,329,171	82,450,218.00	93.246.633,00		
	Hasil usaha desa		55.233.000				
	Tanah Kas Desa	39.052.000	24,000.00	74,990,000.00	83.490.000,00	70.270.800	70.270.800
	Usaha Desa Lainnya	-	9.885.000	2,400,000.00			
	Hasil asset Desa	700.000	3.450.000	5,060,218.00	9.756.633,00	200.000	200.000
	Lain-lain pendapatan yang sah	3972.724	3.656.582				
Pendapatan Transfer		1.921.501.263	2.426.721.500	2,936,384,960.00	3.100.957.982,00	2.172.816.830	3.328.059.000
	Dana Desa	364.475.000	841.540.000	1,080,108,000.00	1.122.320.000,00	843.384.000	1.487.384.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.716.264	118.750.500	135,068,960.00	160.638.982,00	101,243.830	212.906.000
	Alokasi Dana Desa	1.315.810.000	1.394.086.000	1,501,208,000.00	1.372.999.000,00	1.008.189.000	1.241.469.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	136,500,000	170,000,000.00	220,000,000.00	445.000.000,00	220.000.000	383.300.000
				-			
Lain-lain Pendapatan		200.000	-	-	8.980.000,00		1.000,000

Desa yang Sah							
	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	100.000	-				

Sumber : Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes 2015-2020

3. Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja pada akhir tahun 2018 sebanyak orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sektor formal atau non formal sebanyak 6424 orang. Dengan demikian pada akhir tahun 2019 angka pengangguran di Kalurahan 6% sebanyak 453 orang. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Caturharjo adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

4. Perekonomian Desa

Perekonomian Kalurahan Caturharjo berdasar data pada tahun 2018 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan.

a. Investasi pemerintah desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah empat belas pedukuhan. Besaran investasi pembangunan pemerintah Kalurahan Caturharjo pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.23 sebagai berikut :

Tabel. 2.23: Besaran Investasi Pembangunan Kalurahan Caturharjo Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Investasi
	2019	956.914.600
	2020	621.343.700
	Jumlah	

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2019-2020

b. Investasi masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat Kalurahan Caturharjo selengkapnya disampaikan dalam tabel 2.24 sebagai berikut :

Tabel 2.24: Besaran Investasi Masyarakat Kalurahan Caturharjo Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Jumlah Investasi	Prosentase Kenaikan
	2015	-	-
	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	-	-
	2019	-	-
	2020	-	-
	Jumlah	0	0

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2015-2018

c. Pertanian, perikanan dan peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2018 Kalurahan Caturharjo adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas padi rata-rata 21 ton GKP/ha, jagung +-15 ton/ha dan produk pertanian lainnya rata-rata 10 ton/ha.
- 2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- 3) Berkembangnya kelompok-kelompok ternak baik sapi maupun kambing di pedukuhan Tegalsempu, glntung lor,gluntung kidul dan banyuurip

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

d. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Caturharjo didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut dicatat jenis industri yang ada di Kalurahan Caturharjo sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Caturharjo adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

e. Koperasi dan lembaga keuangan mikro

Koperasi merupakan soko guru ekonomi kerakyatan yang sampai dengan tahun 2018 diharapkan sebagai tonggak penggerak perekonomian desa, keberadaannya dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya pemupukan modal baik untuk investasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun untuk keperluan lain. Di Kalurahan Caturharjo terdapat belum ada unit koperasi dan embrio-koperasi banyak dikembangkan oleh RT, ibu-ibu PKK dan Dasawisma. Sedangkan lembaga keuangan mikro non koperasi di Desa terdapat UED-SP yang dikelola oleh pemerintah desa, SPP yang dikelola oleh PPK Pandak, UPK yang dikelola oleh BKM, UP-FMA yang dikelola oleh gapoktan. Permasalahan yang ada antara lain adanya koperasi yang sudah tidak aktif, terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi serta permodalan yang masih terbatas. Peningkatan kapasitas pengelola serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan. Secara lengkap, jenis maupun jumlah koperasi yang ada di Kalurahan Caturharjo disampaikan dalam tabel 2.25 sebagai berikut :

Tabel 2.25: Data Koperasi di Kalurahan Caturharjo Tahun 2020

No	Jenis Koperasi	Jumlah (Unit)
	KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia)	0
	KOPKAR (Koperasi Karyawan)	0
	KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)	0
	KSU (Koperasi Serba Usaha)	0
	KOPINKRA	0
	KPP KLB	0
	KOPWAN (Koperasi Wanita)	0
	UPK	1
	SPK	1
	Jumlah	

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2020

f. Sarana dan prasarana desa

1) Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Caturharjo pada akhir tahun 2020 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa mantap 100% dan jalan dusun 80% mantap.

2) Sarana dan prasarana irigasi

Pada tahun 2020 areal sawah telaah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Caturharjo. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang mantap Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

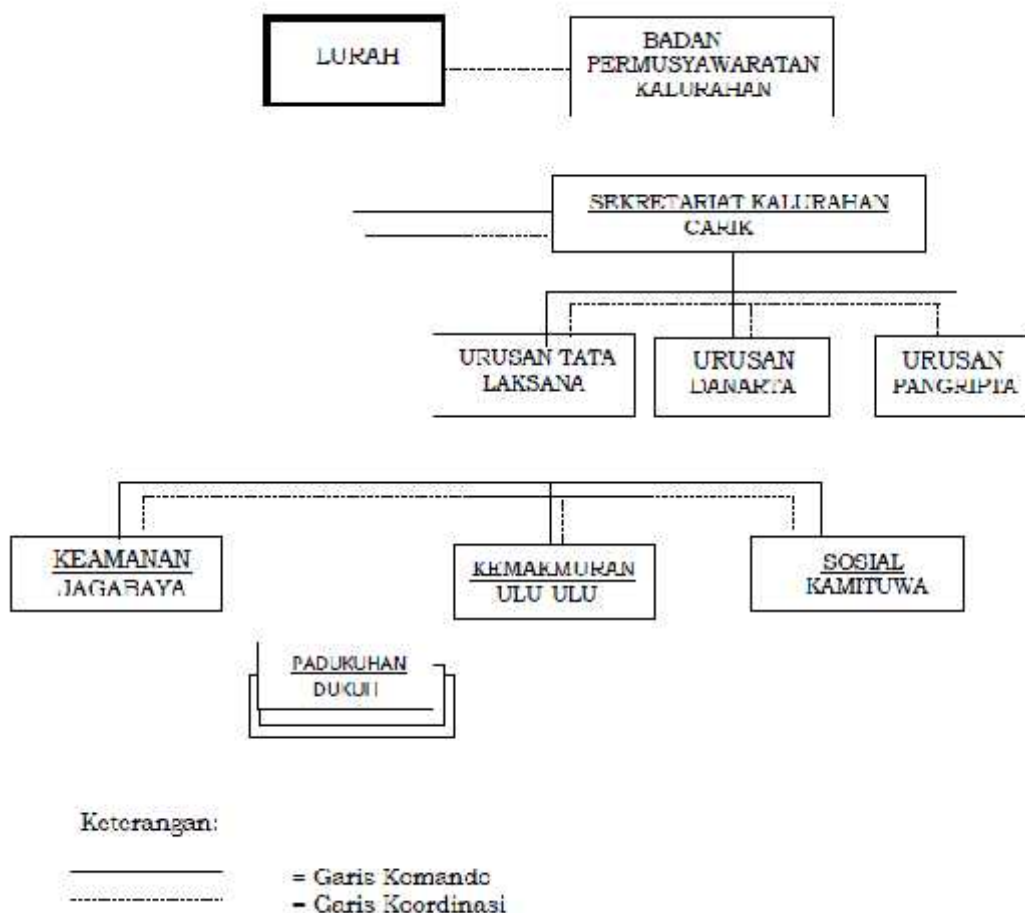
- Kondisi jaringan irigasi 30% kurang memadai.
- Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi.
- Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

H. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Stuktur organisasi Kalurahan Caturahrjo tahun 2020 terdiri dari lurah, carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 14 (empat belas) dukuh, serta 1 staf desa. Untuk membantu tugas-tugas perangkat

desa maka telah diangkat 6 staf honorer. Struktur organisasi Kalurahan Caturharjo digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Caturharjo



Komposisi sumberdaya manusia perangkat Kalurahan Caturharjo tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.25: Data Perangkat Kalurahan Caturharjo

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir
1	Lurah	H.Wasdiyanto, SSi	S1
2	Carik	Dimas Satrio Wibowo	S2
3	Kepala Urusan Tata Laksana	Ngatinah	Sma
4	Kepala Urusan	Latifah Mei A	D4

	Danarta		
5	Kepala Urusan Pangripta	Wiwin R	S1
6	Jagabaya	Wiwd Yoan F	SMA
7	Ulu-Ulu	Ratnadi S	S1
8	Kamituwo	Bunyamin	D3
9	Dukuh Banyuurip	Kasidi	STM
10	Dukuh Gluntung Lor	Endardi	SPG
11	Dukuh Gluntung Kidul	Ngadiono	SLTA
12	Dukuh Gumulan	Suyatno	SLTA
13	Dukuh Tegalsempu	Wartimin	SLTA
14	Dukuh Tunjungan	Sukijo	SLTA
15	Dukuh Krapakan	Wahyu Tri Cahyono	SLTA
16	Dukuh Samparan	Juwakir	SLTA
17	Dukuh Tegallayang 09	Supartono	SLTA
18	Dukuh Tegallayang 10	Dwi Hertanto	SLTA
19	Dukuh Kuroboyo	Suatmaji	SLTA
20	Dukuh Korowelang	Mujimin	SLTA
21	Dukuh Glagahan	Samijo	SLTP
22	Dukuh Bogem	Ahmad Susilo	SLTA
23	Staf Pamong	Dalrubi	SLTA
24	Staf Pamong	Devita Ariani, S.H	S1
25	Staf Pamong	Sinta Kumala Dewi, Amd.Akt	D3
26	Staf Pamong	Purwanti, S.Kom.	S1
27	Staf Honorer	Sabani, S.Pd.	S1
28	Staf Honorer	Eko Muryanto	SMA
29	Staf Honorer	Wahyudi	SMA

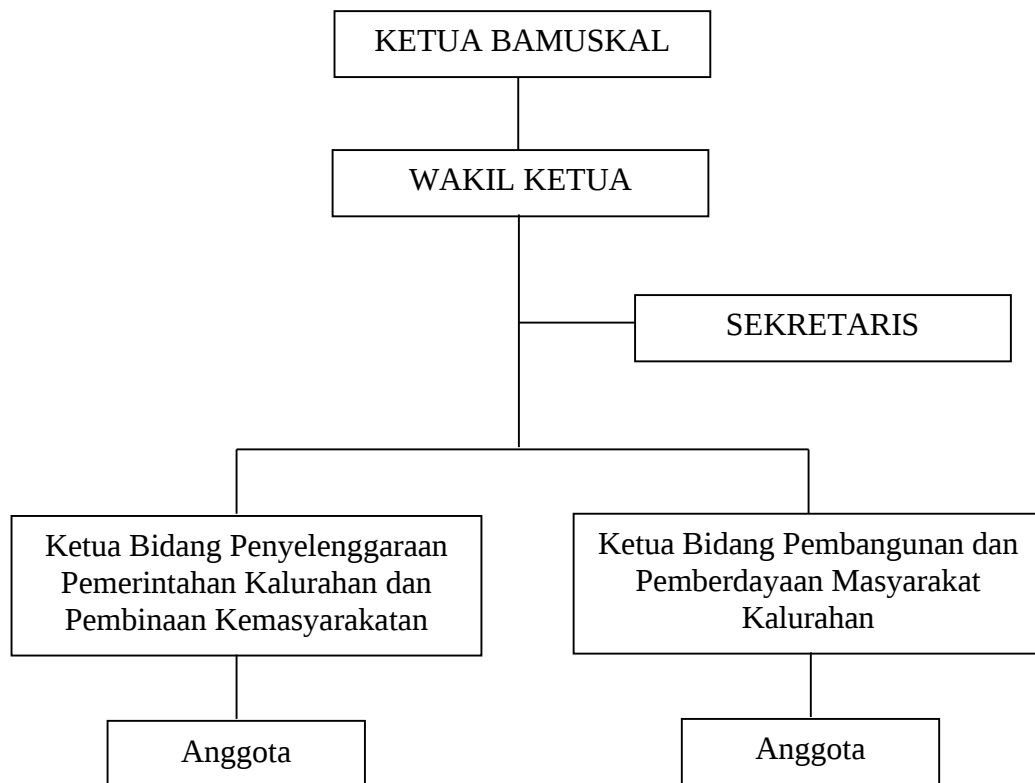
Sumber : Data Monografi Desa 2020

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 7 orang. Fungsi Bamuskal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas Bamuskal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. Bamuskal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Bamuskal dan mengelola aspirasi

masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

Bamuskal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Bamuskal memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Struktur organisasi Bamuskal ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo



Komposisi sumberdaya manusia anggota Badan Permusyawaratan KalurahanCaturharjo tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.25: Data Anggoa Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
----	--------------	----------------	---------------------	------------

	Ketua	Sugiyanta, S.Pd MA	S2	2018-2024
	Wakil Ketua	Yudono	SLTA/SGU	2018-2024
	Sekretaris	Sugi S.Pd	S1	2018-2024
	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Herwanta, SE	S1	2018-2024
	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Sariyo, S.Pd	S1	2018-2024
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Didik Sudarno	SLTA	2018-2024
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Tugiyem, S.Ag	S1	2018-2024

Sumber : Data Monografi Desa 2020

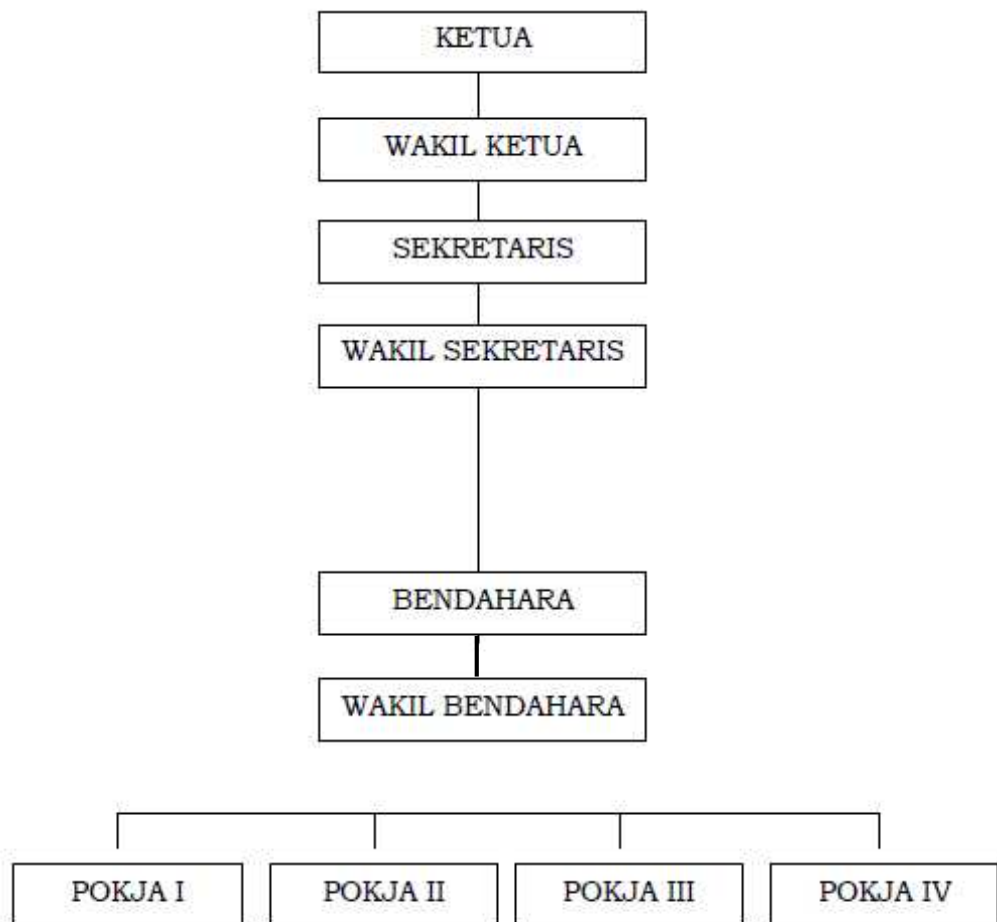
Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Caturharjo antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal) dan Karang Taruna.. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokglat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karangtaruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut :

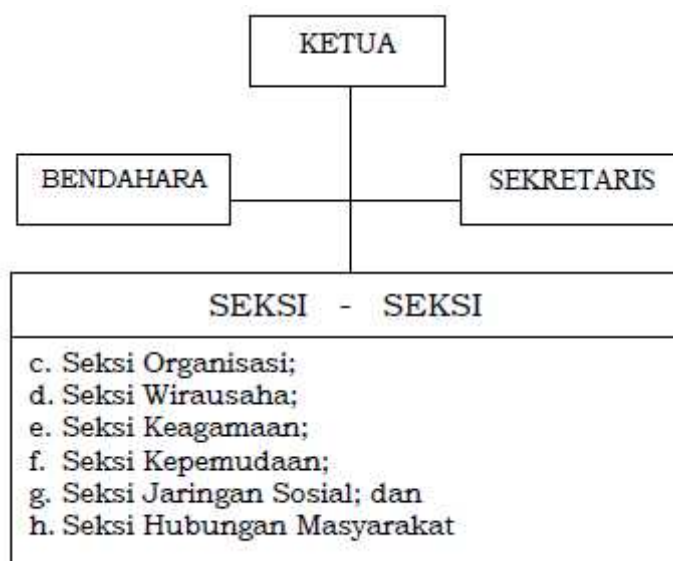
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Caturharjo



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kalurahan C



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Caturharjo



Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Adapun kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan berikut:

Tabel 2.25: Data Anggoa Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo

No	Nama Lembaga	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Nomer SK
	TP-PKK Kal	Siti Wakidah	Sinta KD	Latifah MA	
	LPMK				
	Karang Taruna	Adin A	Summi Hartanti	Norawati	
	FPRB Kal		Andri Nur	Ratnadi	
	Gapoktan	Sutris	-	-	
					
					

Sumber : Data Monografi Desa 2020

I. Pelayanan Publik

Pemerintah Kalurahan Caturharjo telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Caturharjo belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2020 yang pelayanan yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:

- Surat/blanko Pengantar Nikah
- Surat/blanko Pengantar Cerai
- Surat/blanko Pengantar Rujuk
- Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
- Surat/blanko Pengantar Bepergian
- Surat/blanko Pengantar KTP
- Surat/blanko Pengantar C1
- Surat/blanko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

- j. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
- k. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara
- l. Surat/blanko Keterangan Kematian
- m. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
- n. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
- o. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
- p. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.

2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:

- a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
- b. Legalisasi Pos Wesel
- c. Legalisasi Surat Kuasa
- d. Legalisasi Jenis-jenis Surat Lainnya

3. pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :

- a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijin Gangguan
- b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Rekomendasi Konversi Tanah
- e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
- f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
- g. Rekomendasi Lainnya

4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :

- a. Jual-beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Pembagian warisan
- e. Wakaf

5. Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari :

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

6. Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
- c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan

7. Pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari
- b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari
- c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari
- d. Sewa Gedung Olahraga Sehari
- e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (*service performance standard*) serta desain ruangnya.

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi Kalurahan

Kalurahan Caturharjo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan organisasi. Inovasi kebijakan seperti pendirian BUMDesa dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Berikut hasil pemetaan kondisi eksisting dan potensi yang ada di Kalurahan Caturharjo.

1. Sumber Daya Alam

Kalurahan Caturharjo terletak di sebelah Barat Kapanewon Pandak. Wilayah ini mempunyai ciri fisik wilayah daerah persawahan yang subur dan daerah pegunungan kering. Kalurahan Caturharjo sendiri mempunyai karakteristik fisik yang beragam. Klas kemiringan lereng terbagi menjadi 3 (tiga) klas, yaitu klas 0 – 2 % (471 Ha), klas 2 – 8 % (98 Ha), dan klas 8 – 15 % (19 Ha). Selain itu, Kalurahan Caturharjo mempunyai jenis tanah Kambisol (583 Ha) dan tanah Grumusol (5 Ha). Kondisi Geologi Kalurahan Caturharjo mempunyai 2 formasi, yaitu Formasi Sentolo dan Formasi Gunung Merapi, dengan kondisi geohidrologi terletak pada akuifer ruang antar butir, dengan produktifitas sedang.

Kondisi fisik Kalurahan Caturharjo yang beragam tentu mempengaruhi potensi sumber daya alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Data Sumber daya alam Kalurahan Caturharjo dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Sumber Daya Alam Kalurahan Caturharjo

No	Jenis Sumberdaya Alam	Volume	Satuan
	Lahan Kebun	249	Hektar
	Lahan Sawah Irigasi	195	Hektar
	Lahan Tegalan	29	Hektar
	Lahan Permukiman	100	Hektar
	Lahan Tadah Hujan	14	Hektar
	Sungai	7.795	Meter
	Jalan Nasional	369	Meter
	Jalan Kabupaten	9.118	Meter
	Jalan Kalurahan	914.000	Meter
	Jalan Lingkungan/Gang	23.954	Meter
	Jembatan	11.361	Meter
	Komoditas Pertanian		
	a. Padi		
	b. Tebu		
	Komoditas kehutanan		
	a. Jati		

	b. Mahoni		
	c. Sengon		
	Komoditas peternakan		
	a. Sapi	1449	Ekor
	Komoditas Unggas		
	Ayam Petelur	15116	Ekor
	Ayam Ras Pedaging	2608	Ekor
	Ayam Buras	8996	Ekor
	Itik	865	Ekor
	Komoditas perikanan		
	a. Lele		
	b. Gurami		
	c. Nila		
	d. Bawal		
	e. Ikan hias		

Sumber : data Monografi tahun 2020.

2. Sumber Daya Manusia

Selain masih menyimpan potensi alam yang cukup besar, potensi kuat yang ada di Kalurahan Caturharjo terletak pada kekuatan Sumber Daya Manusia. Dilihat dari tingkat pendidikan memang belum dapat dikatakan optimal karena sebagian besar masih lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Belum banyak yang menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini menyebabkan angka buruh harian lepas juga masih tinggi. Namun, meskipun demikian yang patut menjadi catatan positif adalah jiwa wirausaha masyarakat yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat tingginya masyarakat yang bekerja di sektor non-formal (wiraswasta). Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebagai karyawan atau PNS. Potensi inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam 6 tahun ke depan, terutama para pemuda yang baru masuk dalam usia produktif. Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Caturharjo dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Caturharjo

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	11.563	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	5.818	Jiwa
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	5.745	Jiwa
	d. Jumlah Kepala Keluarga	4.069	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	11.491	Jiwa
	b. Kristen	19	Jiwa
	c. Katholik	53	Jiwa
	d. Hindu	0	Jiwa
	e. Budha	0	Jiwa
	f. Penganut/Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	0	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Usia		

	a. Kelompok Pendidikan		
	1) 00 – 04 tahun	728	Jiwa
	2) 05 – 06 tahun	290	Jiwa
	3) 07 – 12 tahun	945	Jiwa
	4) 13 – 15 tahun	446	Jiwa
	5) 16 – 18 tahun	452	Jiwa
	6) 19 - keatas	2.759	Jiwa
	b. Kelompok Tenaga Kerja		
	1) 10 – 14 tahun	803	Jiwa
	2) 15 – 19 tahun	771	Jiwa
	3) 20 - 29 tahun	1.621	Jiwa
	4) 30 – 39 tahun	1.675	Jiwa
	5) 40 – 59 tahun	3.250	Jiwa
	6) 60 Ketas	1.987	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan		
	1) Sarjana (S1-S3)	651	Jiwa
	2) Akademi (D1-D3)	283	Jiwa
	3) SMU/SMK	3.383	Jiwa
	4) SMP	1.741	Jiwa
	5) Sekolah (SD)	2.656	Jiwa
	6) Taman Kanak-Kanak (TK)		
	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	267	Jiwa
	b. TNI (Tentara nasional Indonesia)	21	Jiwa
	c. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	27	Jiwa
	d. Karyawan Swasta	1.109	Jiwa
	e. Wiraswasta / Pedagang	1.206	Jiwa
	f. Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan	1.994	Jiwa
	g. Karyawan BUMN/BUMD	17	Jiwa
	h. Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	1.669	Jiwa
	i. Tenaga Medis	27	Jiwa
	j. Pekerjaan Lainnya	213	Jiwa

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

3. Sumber Daya Pembangunan

Secara garis besar, Desa Singosaren mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari sarana umum, pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung lainnya. Hanya saja secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Selain itu fungsinya masih belum optimal. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi

meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan	23.954	Meter
	b. Jembatan	11.361	Meter
	c. Gedung pertemuan	1	Unit
	d. Poskamling		
	e. Sumur Resapan		
	f. Lapangan	17	Unit
	g. Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)		
	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	11	Unit
	b. Gedung TK	9	Unit
	c. Gedung SD	5	Unit
	d. Gedung SMP	1	Unit
	e. Gedung SMA/SMK	0	Unit
	a. Gedung Perguruan Tinggi	0	Unit
	a. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an		
	b. Gedung Pondok Pesantren		
	c. Gedung perpustakaan	1	
	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita/Lansia	14	Unit
	b. Pustu	1	Unit
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	e. IPAL Komunal		
	f. klinik bersalin	1	Unit
	g. Apotek	2	Unit
	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Toko		
	b. kios /Warung kelontong	422	
	c. warung makan	20	
	d. wisata kuliner		
	e. jasa (loundry, cuci mobil, dll)		
	f. swalayan		
	g. Restoran/Rumah makan	0	
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha Kecil	155	
	b. Jumlah kelompok Sedang/Besar	8	
	Aset berupa Modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	Aset Prasarana Peribadatan		
	a. Masjid	23	
	b. Musholla	9	
	c. Geraja	1	

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Kalurahan Caturharjo yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Caturharjo tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Situs budaya	-	
	Usaha kerajinan	-	
	Usaha kuliner	-	
	Pengobatan tradisional	-	
	Galeri	-	
	Sejarah	-	
	Sanggar Multi	-	
	Seni Pertunjukan	-	
	Tokoh seni	-	
	Adat istiadat	-	

5. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kalurahan bersifat kemitraan, konsultif dan koordinatif. Disamping Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Caturharjo ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Adapun daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan

No	Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Keberadaan	
		Jumlah	Keaktifan
	LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)		Aktif

	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)		Aktif
	Karang taruna	1 Kelompok	Aktif
	Pok Giat LPMD (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)		Aktif
	RT (Rukun Tetangga		Aktif

	Daftar Lembaga Kalurahan		
	Majlis Taklim	-	-
	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	1	Aktif
	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	1	Aktif
	Kelompok Ternak	-	

B. Masalah

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim.

Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi. Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dikoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Daftar permasalahan Kalurahan Caturharjo tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Daftar Permasalahan Kalurahan Caturharjo

No	Bidang	Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Penetapan dan penegasan batas kalurahan, yaitu Gapura dan Titik Koordinat Batas Desa 2. Pendataan Kalurahan yaitu profil kalurahan 3. Penyusunan tata ruang kalurahan, yaitu pembangunan tata ruang hijau kalurahan 4. Pengelolaan Sistem Informasi Desa yaitu peta Kalurahan 5. Peyelenggaraan perencanaan Desa, yaitu penyusunan Masterpalan Kalurahan, RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan 6. Penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan, yaitu sapras dan SPP PNPM-MPd 7. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor kalurahan, yaitu rehab kantor kalurahan, aula atau gedung pertemuan. 8. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya direncanakan. 9. Profesionalisme kinerja perangkat kalurahan
	Pelaksanaan Pembangunan	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan, yaitu pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi dan TPT 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu polindes, posyandu, penanggulan stunting 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, TPQ 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana ekonomi, yaitu BUMDes, Irigasi UMKM 5. Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu penghijauan
	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, LPMD, PKK, Karangtaruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, yaitu siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu PHBA 4. Pengadaan sarana dan pra sarana olah raga, yaitu lapangan olah raga 5. Pembinaan lembaga adat, yaitu bersih kalurahan atau merti dusun 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan,

		UMKM, Disabilitas Pelatihan penggunaan Bahan bekas, Kopwan dan Puap 2. Perlindungan dan bantuan hukum kepada masyarakat terutama perempuan dan anak 3. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : biogas 4. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan; yaitu : Bimtek, Sosialisasi peyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 5. Peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu Pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	1. Penanggulangan Bencana yaitu kegiatan kesiapan mendalam menghadapi bencana tahunan maupun bencana nasional di tingkat desa 2. Keadaan Mendesak: kebijakan dalam menghadapi bencana yang menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan dan sosial

Demikian potensi dan Masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Caturharjo selama 6 tahun ke depan.

BAB IV
VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN CATURHARJO

A. Visi dan Misi Lurah

Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahandalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Caturharjo tahun 2021 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai ;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Caturharjo tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Caturharjo untuk enam tahun mendatang (2021 - 2026) adalah ***Terwujudnya masyarakat Caturharjo yang sehat, tertib, sejahtera, cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Caturharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya
- Tertib dalam Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundangundangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.
- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Caturharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Cerdas dalam arti masyarakat caturharjo yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- Berbudaya dalam arti masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan local yang istimewa.
- Berakhlak mulia dalam arti kondisi kehidupan masyarakat Caturharjo yang berlandaskan nilai sosial dan keagamaan

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk

mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Caturharjo dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo
2. Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan lesejahteraan warga kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata
4. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo
5. Melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo
6. Meningkatkan iman dan taqwa warga kalurahan Caturharjo

B. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Caturharjo maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Caturharjo mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

b. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Caturharjo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna

e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahansenantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama

Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo

Tujuan:

- a. Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan keamanan dan kegawatdarutan kesehatan yang lain
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat
- c. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta dalam penyediaan layanan kesehatan
- d. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;

Sasaran

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan yang lain
- b. Meningkatnya respon pemerintah Kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang lain;
- c. Terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan sehat;
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;

2. Misi kedua

Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku

Tujuan:

- a. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

- c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
- d. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- e. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan primadengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. Terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
- e. Menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- f. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
- g. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- j. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan;
- k. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

3. Misi ketiga

Meningkatkan kesejahteraan warga kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata

Tujuan

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam;
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMDes;

- d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan;
- e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata.
- i. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah;
- j. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta

Sasaran

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- b. Tersedianya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- d. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran;
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas para wirausahawan caturharjo
- f. Terwujudnya wisata Desa yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat
- g. Terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- h. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;
- i. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- j. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain, jalan, dan lain-lain;
- k. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- l. Terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan, misalnya Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS);
- m. Terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan sehat

- n. Meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- o. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- p. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- q. Meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- r. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- s. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

4. Misi keempat

Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo

Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan keterampilan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Caturharjo yang Terampil dan siap kerja;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran

- a. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna;
- d. Terselenggaranya lembaga pelatihan di desa.
- e. Meningkatnya perlindungan dan keselamatan kerja dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;

5. Misi keenam

Melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo

Tujuan

- a. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat;
- b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat.

Sasaran

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat; kebudayaan setempat;
- b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya;

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Rumusan strategi pelaksanaan pembangunan selama 6 tahun ini ditentukan berdasarkan analisa terhadap kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang lazim sering disebut dengan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) terhadap potensi kalurahan. Untuk memberikan penilaian terhadap analisis SWOT ini digunakan 4 pertanyaan, yakni: 1) Peluang eksternal terpenting apakah yang dimiliki?; 2) Ancaman eksternal terpenting apakah yang dihadapi?; 3) Apa kekuatan internal yang terpenting yang dimiliki?; dan 4) Apa kelemahan terpenting yang ada? Melalui pendekatan analisis SWOT, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam upaya pengembangan Kalurahan Caturharjo, yaitu:

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Analisa Lingkungan Internal

Kekuatan Kalurahan Caturharjo adalah:

- 1) Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- 2) Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.
- 3) Terjalinnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada
- 4) Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representatif
- 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar
- 6) Adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk melakukan perubahan

Adapun yang menjadi unsur kelemahan Kalurahan Caturharjo adalah:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin)
- 2) Lemahnya profesionalisme perangkat kalurahan
- 3) Terbatasnya kemampuan keuangan kalurahan
- 4) Belum optimalnya pengelolaan tanah kas kalurahan sebagai sumber pendapatan
- 5) Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah
- 6) Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Unsur peluang yang bisa dikelola dan dimanfaatkan Kalurahan Caturharjo antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- b. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem *bottom up*
- c. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi.
- d. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata

Sedangkan unsur yang berpotensi menjadi ancaman pembangunan bagi Kalurahan Caturharjo adalah:

- a. Segregasi yang masih terasa sebagai dampak krisis multidimensial yang berkepanjangan
- b. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan
- c. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan kalurahan lain maupun antar pedukuhan di wilayah Kalurahan Caturharjo
- d. Letak geografis Kalurahan Caturharjo yang berbatasan dengan kota Yogyakarta
- e. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kalurahan Caturharjo ditentukan oleh dua pilar yakni pembagian pendapatan APBKal (*distribution of income*) serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (*Participation and empowerment*). Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah kalurahan menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan cara memastikan usulan program yang disamakan warga masyarakat kalurahan terakomodasi didalam RPJMKal.
- b. Membangun sistem pemerintahan kalurahan yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat kalurahan dan masyarakatnya).
- c. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang responsif, partisipatif, akuntabel dan transparan.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Strategi Pembangunan Kalurahan

Strategi pembangunan Kalurahan Caturharjo memuat deskripsi tentang pendekatan strategi untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi-misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi pertama

Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo.

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan keamanan dan kegawatdarutan kesehatan yang lain
- b. Peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta dalam penyediaan layanan kesehatan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;
- e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan yang lain
- f. Meningkatkan respon pemerintah Kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang lain;
- g. Menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat;
- h. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- i. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- j. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;

2. Misi kedua

Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku

Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas
- c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
- d. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- e. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan primadengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- f. Menciptakan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- g. Meningkatkan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- h. Meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- i. Meningkatkan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
- j. Meningkatkan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- k. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
- l. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- m. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- n. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- o. Meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan;
- p. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

3. Misi ketiga

Meningkatkan kesejahteraan warga kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata

Misi ketiga mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam;
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMDes;
- d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan;
- e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata.
- i. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah;
- j. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta
- k. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- l. Mengoptimalkan Tersedianya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- m. Menciptakan perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- n. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran;
- o. Meningkatkan kuantitas dan kualitas para wirausahawan caturharjo
- p. Mewujudkan wisata Desa yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat
- q. Mewujudkan kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- r. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian;
- s. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- t. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain, jalan, dan lain-lain;
- u. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;

- v. Menciptakan unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan, misalnya Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS);
- w. Menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat
- x. Meningkatkan fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- y. Mewujudkan kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- z. mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- aa. Meningkatkan fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- bb. Mewujudkan kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- cc. Mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

4. Misi keempat

Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo

Misi keempat mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan keterampilan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Caturharjo yang Terampil dan siap kerja;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.
- d. Menciptakan Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam;
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
- f. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna;
- g. Menyelenggarakan lembaga pelatihan di desa.

- h. Meningkatkan perlindungan dan keselamatan kerja dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;

5. Misi kelima

Melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo

Misi kelima mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat;
- b. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat; kebudayaan setempat;
- d. Mengoptimalkan Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya;

B. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6 % maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: a) Rendahnya partisipasi masyarakat; b) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; c) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; d) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan d) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Oleh karena itu dalam RPJMKal ini pemerintah Kalurahan Caturharjo menempatkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama. Sasarannya menurunnya angka kemiskinan dari sebanyak 6227 KK pada akhir tahun 2020 menjadi sebanyak 1500 KK pada akhir tahun 2026 atau sebesar 23,8 %. Sedangkan angka pengangguran turun dari 453 orang pada tahun 2019 menjadi 100 orang pada tahun 2026 atau turun sebesar 77 %.

Untuk mencapai tujuan prioritas utama tersebut, yang akan dilakukan didalam pembangunan Kalurahan Caturharjo pada tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan
5. Meningkatkan daya dukung lingkungan
6. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran lainnya adalah meningkatnya pendapatan asli kalurahan dari Rp 70.000.000 - pada akhir tahun 2020 menjadi Rp. 100.000.000,- pada akhir 2021. Begitu kenaikan tahun berikutnya minimal sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Indikator sasaran lainnya adalah:

1. Sarana dan prasarana (infrastruktur) kalurahan harus semakin baik dengan beberapa indikator yang disepakati didalam musyawarah kalurahan yaitu:
 - a. Jumlah sarana pendidikan dan tempat ibadah bertambah sebanyak 10%.
 - b. 80% panjang jalan kalurahan dalam kondisi baik (mantap)
 - c. 65% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
 - d. 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
 - e. 80% jalan kampung dikeraskan
 - f. Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 100%
2. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
 - a. Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
 - b. Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga
3. Kualitas pemerintahan kalurahan meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat kalurahan
 - c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
 - d. Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Besaran APBKal pada tahun 2015 – 2020 selalu mengalami defisit anggaran. Kebijakan yang diputuskan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-

hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan Kalurahan pada masa yang akan datang.

Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Arah kebijakan anggaran Kalurahan Caturharjo difokuskan untuk mendukung program-program dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas Kalurahan Caturharjo tahun 2020 – 2026 terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasikan kebijakan umum anggaran selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function*. Pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Kepala urusan terdiri dari Kepala Urusan Danarto, Urusan Tata Laksana dan Urusan Pangripto. Sedangkan kepala seksi terdiri dari seksi keamanan (Jagabaya), seksi kemakmuran (Ulu-Ulu) dan seksi sosial (Kamituwo). Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan. Kepala urusan dan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di kalurahan. TPK ini dibentuk apabila kegiatan/pekerjaan yang sudah diprogramkan karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi dan kepala urusan.

Penunjukan PPKD dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalurahan. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan

yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan Kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahanyang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban Kalurahandalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Caturharjo dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal, karena besaran pendapatan Kalurahan menentukan kemampuan Kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebencanaan. Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Komponen atau sumber pendapatan kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PADes), yang berasal dari hasil usaha kalurahan (Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), jasa pengadaan), hasil aset kalurahan, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli kalurahan.
2. Dana transfer yang berasal dari pendapatan Dana Kalurahan (DD), Alokasi Dana Kalurahan (ADD), Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHPR) daerah kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan kalurahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi hasil usaha kalurahan dan hasil aset kalurahan. Arah kebijakan pendapatan kalurahan dalam rangka optimalisasi atas hasil usaha kalurahan dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan bagi hasil dari BUMKal dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari setor jasa penggandaan dokumen dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Selain itu arah kebijakan kalurahan dalam rangka optimalisasi hasil asset kalurahan meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi dari sewa tanah kas kalurahan
2. Meningkatkan kontribusi dari sewa gedung pertemuan dan gedung olah raga

3. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
4. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan kalurahan (Gudang, rumah makan, bengkel, RSSS dan lain-lain)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan. Besarnya Pendapatan Asli Kalurahan secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Caturharjo tahun anggaran 2015 - 2020 tertuang dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1: Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Caturharjo
Tahun Anggaran 2015-2020

Uraian		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Desa		40.724.724	62,329,171	82,450,218.00	93.246.633,00		
	Hasil usaha desa		55.233.000				
	Tanah Kas Desa	39.052.000	24,000.00	74,990,000.00	83.490.000,00	70.270.800	70.270.800
	Usaha Desa Lainnya	-	9.885.000	2,400,000.00			
	Hasil asset Desa	700.000	3.450.000	5,060,218.00	9.756.633,00	200.000	200.000
	Lain-lain pendapatan yang sah	3972.724	3.656.582				
Pendapatan Transfer		1.921.501.263	2.426.721.500	2,936,384,960.00	3.100.957.982,00	2.172.816.830	3.328.059.000
	Dana Desa	364.475.000	841.540.000	1,080,108,000.00	1.122.320.000,00	843.384.000	1.487.384.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.716.264	118.750.500	135,068,960.00	160.638.982,00	101,243.830	212.906.000
	Alokasi Dana Desa	1.315.810.000	1.394.086.000	1,501,208,000.00	1.372.999.000,00	1.008.189.000	1.241.469.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	136,500,000	170,000,000.00	220,000,000.00	445.000.000,00	220.000.000	383.300.000
				-			
Lain-lain					8.980.000,00		1.000,000

Pendapatan Desa yang Sah		200.000	-	-			
	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	100.000	-				

Sumber : Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes 2015-2020

Berdasarkan tabel 5.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan asli kalurahan cenderung menurun pada periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-

E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional pemerintah kalurahan.
 - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan kalurahan.
 - c. Pengelolaan administrasi kependuddukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan'
 - e. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - f. Sub Bidang Pertanian
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - g. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - h. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral
 - i. Sub Bidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olah raga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Kelautan dan perikanan
 - b. pertanian dan peternakan
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan

- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Dukungan penanaman modal
 - g. Perdagangan dan perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Menkalurahank Kalurahan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Penanggulangan bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Menkalurahank

Kebijakan belanja kalurahan tahun anggaran 2015-2020 menggambarkan arah kebijakan belanja kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Caturharjo Tahun 2015-2018. Belanja kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja kalurahan sebagai berikut :

1. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
2. Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.
3. Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dala rangka melaksanakan urusan peerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja kalurahan meprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan maka setiap penge-luaran belanja atas beban APBKalurahan arus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materia yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pamong Kalurahan, BPD, LKD dan Lembaga lainnya diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBKalurahan dengan persetujuan Lurah Kalurahan dan dilanjutkan kepada Bendahara Kalurahan. Khusus untuk BPD, LKD dan lembaga lainnya pencairan dana APBDes harus disertai Permohonan atau proposal yang selanjutnya diikuti dengan bukti pengeluaran yang sah untuk dilaporkan kepada Pemerintah Kalurahan. Untuk pencairan dana APBKalurahan harus mendapat pengesahan oleh Carik atau Kepala Bagian Keuangan Kalurahan sebagai PTPKD yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Caturharjo pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang. Proporsi realisasi belanja kalurahan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2. Realisasi Belanja Kalurahan Caturharjo
Tahun Anggaran 2015 - 2020

No.	Uraian Belanja Kalurahan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	549.417.505	747.609.238	856.154.314	955.194.077	1.035.866.148	1.706.155.137,26
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	882.116.200	1.487.608.175	1.537.265.100	1.672.125.000	1.443.889.600	621.343.700
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	284.003.460	164.196.900	261.139.900	283.205.350	557.709.900	181.539.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.619.850	168.804.400	177.099.500	191.245.000	113.928.600	76.950.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	-	-	13.670.000	6.882.500	1.530.000	552.855.875

--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Perdes Realisasi APBDes tahun anggaran 2015-2020

F. Potensi dan Masalah

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan yang dihadapi dan penanggulangan masalah serta gambaran potensi. Potensi dan masalah yang ada secara detail dapat dilihat dalam tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Data Permasalahan dan Potensi Pembangunan Kalurahan

No	Permasalahan	Potensi
	Pada musim kemarau hasil panen merosot	- Sungai - Air tanah - Tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
	jalan aspal, cor blok pedukuhan rusak	Tenaga Gotong royong dan swadaya masyarakat
	Pada musim hujan banyak genangan air di lingkungan penduduk	- selokan/drainase - tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
	Pada musim penghujan lahan sawah sering tergenang air	- Saluran irigasi - Tenaga, Gotong royong dan swadaya masyarakat
	Degradasi lahan sawah	Sawah
	Terdapat home industri yang kurang berkembang	Modal, tenaga, kelompok
	Masih ada orang atau keluarga kurang mampu	Modal, tenaga, Swadaya BUMKalurahan
	Terdapat rumah tidak layak Huni	Gotong royong
	Literasi keuangan keluarga Rendah	Keluarga
	Ekonomi Keluarga	- Keluarga - Penghasilan keluarga
	Masih terdapat angka pengangguran	- Tenaga kerja - BUMKalurahan
	Mindset gaya hidup	Keluarga
	Kurangnya sarana untuk pertemuan warga	Tenaga, gotong royong dan swadaya
	Sering terjadi kecelakaan	Tenaga, gotong royong
	Kurangnya penerangan jalan	Tenaga, gotong royong
	Komoditas pangan langka	- Lahan - Tanaman lokal
	Pengetahuan keanekaragaman pangan masih kurang	Sumber daya Manusia
	Ketergantungan sistem produksi	- Tenaga

	(benih, pupuk, obat)	- BUMKalurahan
	Pengelolaan sampah	- Tenaga - Bank sampah - BUMDe
	Konservasi sumber daya air	- air tanah - air sumur - air PAM - Telaga/embung
	Masih terdapat anak putus Sekolah	- keluarga - Lembaga pendidikan
	Kurangnya kesadaran belajar Masyarakat	Keluarga
	Pelanggaran norma dan aturan oleh anak sekolah	- keluarga - lembaga
	Penggunaan gadget yang Berlebih	- Keluarga - Lembaga
	Pengetahuan agama di keluarga masih rendah	- Keluarga - Lembaga agama
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai budaya lokal	- generasi muda - lembaga agama dan budaya - tradisi budaya lokal
	Lemahnya pengadministrasian organisasi agama dan budaya	- masyarakat - lembaga budaya dan agama
	Kekerasan dalam rumah tangga	Rumah tangga
	Kurangnya ruang terbuka hijau ramah anak	- Anak - Lahan - Tenaga, gotong royong
	Kesehatan ibu dan anak	- Lembaga Bapel JPS - Ibu dan Anak - Bidan Kalurahan
	Masyarakat rentan ekonomi non penerima bantuan	- Lembaga Bapel JPS - masyarakat non penerima Bantuan
	Kasus pencurian masih tinggi	- masyarakat - Siskamling
	Kejahatan seksual	- masyarakat - Keluarga - Lembaga
	Kenakalan remaja	- masyarakat - Keluarga - Lembaga

Permasalahan ini akan dikelola untuk menjadi program pembangunan selama 6 tahun dan potensi yang ada akan dikelola sebagai daya dukung pembangunan dalam mewujudkan visi-misi-program prioritas yang telah ditetapkan.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Sustainable Development Goals (SDGs) Kalurahan adalah upaya terpadu mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kalurahan ekonomi tumbuh merata, Kalurahan peduli kesehatan, Kalurahan peduli lingkungan, Kalurahan peduli pendidikan, Kalurahan ramah perempuan, Kalurahan berjejaring, dan Kalurahan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pem-bangunan Berkelanjutan. SDGs Kalurahan merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Kalurahan. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Kalurahan tersebut, yaitu: 1) Kalurahan tanpa kemiskinan; 2) Kalurahan tanpa kelaparan; 3) Kalurahan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan Kalurahan berkualitas; 5) Kalurahan berkesetaraan gender; 6) Kalurahan layak air bersih dan sanitasi; 7) Kalurahan yang berenergi bersih dan terbarukan; 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Kalurahan; 9) Inovasi dan infrastruktur Kalurahan; 10) Kalurahan tanpa kesenjangan; 11) Kawasan pemukiman Kalurahan berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi Kalurahan yang sadar ling-kungan; 13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh Kalurahan; 14) Ekosistem laut Kalurahan; 15) Ekosistem daratan Kalurahan; 16) Kalurahan damai dan berkeadilan; 17) Kemitraan untuk pembangunan Kalurahan; dan 18) Kelembagaan Kalurahan dinamis dan budaya Kalurahan adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Kalurahan tidaklah mudah dan karena itulah penggunaan dana Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaiannya. Pada masa pandemi terdapat 10 SDGs Kalurahan yang berkaitan dengan kegiatan pemu-lihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Kalurahan adalah: 1) Kalurahan tanpa kemiskinan; 2) Kalurahan tanpa kelaparan; 3) Kalurahan sehat sejahtera; 4) Keterlibatan perempuan Kalurahan; 5) Kalurahan berenergi bersih dan terbarukan; 6) Per-tumbuhan ekonomi Kalurahan merata; 7) Konsumsi dan produksi Kalurahan sadar lingkungan; 8) Kalurahan damai berkeadilan; 9) Kemitraan untuk pembangunan Kalurahan; dan 10) Kelembagaan Kalurahan dinamis dan budaya Kalurahan adaptif. Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Kalurahan yaitu :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*no poverty*)
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (*zero hunger*)
3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (*good healt and well being*)
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta memperomosikan kesempatan belajar seumur hidup (*quality education*)
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (*gender equality*)
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*clean water and sanitation*)

7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*affordable and clean energy*)
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*decent work and economic growth*)
9. Membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*industry, innovation, and infrastructure*)
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (*reduced inequalities*)
11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan keberlanjutan (*sustainable cities and communities*)
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*responsible consumption and production*)
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (*climate action*)
14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan (*life below water*)
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengundulan gunung dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*life on land*)
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*peace, justice and strong institutions*)
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*partnership for the goals*).

Atas dasar pengaturan kebijakan negara ini maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Caturharjo yang merupakan penjabaran visi dan misi Lurah telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan secara nasional dan program lain sesuai kewenangan Kalurahan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada di kalurahan. Tahapan penyusunan RPJMKal dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Seluruh proses ini telah dikoordinasikan oleh Tim Penyusun RPJMKal yang dibentuk oleh Lurah yang beranggotakan 11 orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Caturharjo No. 18 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal Dengan susunan terlampir. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan didalam RPJMKal dengan program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Dan karena RPJMD Kabupaten Bantul belum ditetapkan maka penyusunan RPJMKal ini disesuaikan dengan visi-misi dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati Bantul Periode 2021 - 2024. Diantara program prioritas yang diselaraskan dengan program sesuai kewenangan Kalurahan adalah:

1. Pengembangan SDM Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
 - a. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal sesuai kewenangan Kalurahan.
 - b. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa.
 - c. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga, melauai budaya pola hidup sehat (PHBS).
 - d. Optimalisasi peran posyandu dan posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
 - e. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.
 - f. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebuda-yaan istimewa, serta memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.
 - g. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
 - h. Pembinaan kerukuran antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
2. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
 - a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.

- b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura.
 - d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.
 - e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - f. Modernisasi pasar tradisional.
 - g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
 - h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Kalurahan.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
- a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi serta pemulihan keseimbangan ekosistem
 - b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
 - c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumber-daya ekonomi dan energi terbarukan.
 - d. Pembangunan infrastruktur peKalurahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi peKalurahan yang bersifat partisipatif dan inklusif berbasis Pedukuhan dengan nilai Rp. 50 - 100 Juta.
 - e. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
 - f. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.
4. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
- a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
 - b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan marginal.
 - d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
 - e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.

Tahapan penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo telah dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana yang diatur didalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan dan Peraturan Menteri Kalurahan PDTT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana disebutkan didalam tabel berikut:

Tabel 6.1. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RPJMKal Kalurahan Caturharjo

No.	Tahapan Penyusunan	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung Jawab

1	Pembentukan Tim Penyusun	22 Januari 2021	Lurah
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kalurahan dan kabupaten	16 Februari 2021	Tim Penyusun
3	PKD Padukuhan Banyuurip	4 Februari 2021	Tim Penyusun
4	PKD Padukuhan Gluntung Lor	3 Februari 2021	Tim Penyusun
5	PKD Padukuhan Gluntung Kidul	3 Februari 2021	Tim Penyusun
6	PKD Padukuhan Gumulan	3 Februari 2021	Tim Penyusun
7	PKD Padukuhan Tegalsempu	5 Februari 2021	Tim Penyusun
8	PKD Padukuhan Tunjungan	3 Februari 2021	Tim Penyusun
9	PKD Padukuhan Krapakan	1 Februari 2021	Tim Penyusun
10	PKD Padukuhan Samparan	1 Februari 2021	Tim Penyusun
11	PKD Padukuhan Tegallayang 9	5 Februari 2021	Tim Penyusun
12	PKD Padukuhan Tegallayang 10	5 Februari 2021	Tim Penyusun
13	PKD Padukuhan Korowelang	3 Februari 2021	Tim Penyusun
14	PKD Padukuhan Kuroboyo	3 Februari 2021	Tim Penyusun
15	PKD Padukuhan Bogem	4 Februari 2021	Tim Penyusun
16	PKD Padukuhan Glagahan	5 Februari 2021	Tim Penyusun
17	FGD Penyelarasan	24 Februari 2021	Tim Penyusun
10	Musyawarah Kalurahan	17 Maret 2021	Bamuskal
11	Penyusunan Rancangan RPJMKal	18 Maret 2021	Tim
12	Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMKal	19 Maret 2021	Pemerintah Kalurahan
13	Musyawarah Kalurahan Penetapan RPJMKal	26 Maret 2021	Bamuskal

Proses pengkajian keadaan Kalurahan telah dilakukan melalui musyawarah padukuhan dan focus group discussion yang melibatkan seluruh stakeholder kalurahan dengan mengacu pada visi-misi-program Lurah dan telah diselaraskan dengan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Bantul periode 2021 - 2024. Semuanya ini juga dalam rangka pencapaian SDGs Kalurahan yang menjadi kebijakan negara. Adapun misi dan program yang telah disampaikan Lurah adalah:

1. Misi pertama

Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo

Tujuan:

- a. Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan keamanan dan kegawatdarutan kesehatan yang lain
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat
- c. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta dalam penyediaan layanan kesehatan
- d. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;

Sasaran

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawatdarutan yang lain
- b. Meningkatnya respon pemerintah Kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang lain;
- c. Terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan sehat;
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kesehatan;

2. Misi kedua

Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku

Tujuan:

- a. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas
- c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
- d. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- e. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan primadengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. Terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
- e. Menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

- f. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
- g. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- j. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan;
- k. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

3. Misi ketiga

Meningkatkan kesejahteraan warga kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata

Tujuan

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam;
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMDes;
- d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan;
- e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata.
- i. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah;
- j. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta

Sasaran

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- b. Tersedianya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

- d. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran;
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas para wirausahawan caturharjo
- f. Terwujudnya wisata Desa yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat
- g. Terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- h. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;
- i. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- j. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain, jalan, dan lain-lain;
- k. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- l. Terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan, misalnya Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS);
- m. Terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan sehat
- n. Meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- o. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- p. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- q. Meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- r. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM;
- s. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

4. Misi keempat

Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo

Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan keterampilan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Caturharjo yang Terampil dan siap kerja;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran

- a. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna;
- d. Terselenggaranya lembaga pelatihan di desa.
- e. Meningkatnya perlindungan dan keselamatan kerja dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;

5. Misi keenam

Melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo

Tujuan

- a. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat;
- b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat.

Sasaran

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni budaya , adat, tradisi dan budaya lokal setempat; kebudayaan setempat;
- b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya;

Untuk melaksanakan program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam kegiatan yang dibagi dalam 5 (lima) bidang yang terdiri dari beberapa sub-bidang. Program/kegiatan tahun 2021 – 2021 tercantum dalam Matriks Lampiran..

Adapun penentuan program prioritas Kalurahan Caturharjo periode 2020 – 2026 difokuskan dan mempertimbangkan pada kepentingan masyarakat sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana

Kalurahan Caturharjo merupakan daerah yang rawan bencana seperti bencana banjir, puting beliung/angin kencang dan sebagainya yang berpotensi mengakibatkan kerusakan bangunan infrastruktur warga masyarakat terutama bangunan tempat tinggal. Penanggulangan bencana setiap tahun akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kalurahan Caturharjo yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain pembangunan sumur resapan, program kalurahan siaga serta memberikan bantuan material untuk perbaikan infrastruktur yang rusak dan lain sebagainya.

2. Keamanan dan ketertiban

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah Kalurahan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

3. Fasilitasi pendidikan anak RTM dan anak berkebutuhan Khusus

4. Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan permasalahan yang merusak kebersihan lingkungan di masyarakat dan mengakibatkan mengganggu kesehatan masyarakat. Melalui konsep 4000 jogangan dan 77 Rumah Kumpul Sampah dan 14 dusun sayur menjadi solusi penanganan dan pengelolaan sampah di Caturharjo

5. Penguatan kelembagaan keluarga

Dengan Penguatan kelembagaan keluarga akan terbentuk ketahanan keluarga dan mendongkrak terlaksananya program program pemerintah kalurahan untuk menuju kesejahteraan masyarakat

6. Akselerasi Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan utama program program yang disusun Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kontribusi UMKM, pengembangan potensi dusun dan pengembangan wisata di setiap pedukuhan

7. pengembangan kawasan budaya

Caturharjo Merupakan desa rintisan budaya. Sebagai amanat dari keistimewaan Yogyakarta Pemerintah kalurahan wajib menguri uri kabudayaan yang ada, kesenian yang ada dan yang merupakan domain keistimewaan yogyakarta

8. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan

Lahan pekarangan luas di wilayah Kalurahan Caturharjo merupakan kekuatan potensial yang wajib dikelola. Melalui konsep 4000 jogangan dan 77 Rumah Kumpul Sampah dan dikemas melalui konsep 14 Dusun sayur/tanaman unggulan

dusun bermaksud untuk mengoptimalisasi lahan pekarangan melalui kemasn wisata gowes dusun.

9. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan kalurahan dan lembaga kalurahan. Lembaga kemasyarkataan kalurahan dan lembaga kalurahan merupakan asset berharga dalam pelaksanaan setiap program kalurahan. Melalui koordinasi dan pembagian peran dan fungsi untuk membantu pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program untuk menuju kesejahteraan masyarakat Caturharjo

Guna melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan maka strategi yang dipakai juga memuat strategi pembangunan Kalurahan dalam mengimplementasikan program Lurah sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Startegi dalam pembangunan kalurahan tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kalurahan serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kalurahan Caturharjo Dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan kegiatan maka ditentukan indikator kinerja capaian RPJMKal 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 6.3. Indikator Capaian Pelaksanaan RPJMKal Kalurahan Caturharjo

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

No	Bidang / Jenis Kegiatan					Indikator Capaian
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)	1)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Persentase Belanja Pegawai
				2)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Persentase Belanja Pegawai
				3)	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Persentase Belanja Pegawai
				4)	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))	Persentase Belanja Operasional
				5)	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Persentase Belanja Bamuskal
				6)	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	Persentase Belanja Operasional

				7)	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Persentase Belanja Operasional
				8)	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	Persentase Belanja Jaminan Bamuskal
				9)	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Persentase Belanja Tunjangan
				10)	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Persentase Belanja THR
				11)	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Persentase Belanja Purna Tugas
				<i>Jumlah Sub Bidang a.</i>		
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1)	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Persentase Belanja Operasional
				2)	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Persentase Belanja Pemeliharaan Gedung
				3)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	Persentase Belanja Pembangunan GOR
				4)	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Persentase Belanja Operasional
				<i>Jumlah Sub Bidang b.</i>		

		c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Persentase Belanja Operasional Administrasi Umum
				2)	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Persentase Belanja Operasional Pendataan
				3)	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	Persentase Belanja Administrasi
				4)	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				5)	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				6)	Pendataan/Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan (dipilih)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				8)	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Pedukuhan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				9)	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Persentase Belanja operasional Kegiatan

				10)	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				<i>Jumlah Sub Bidang c.</i>		
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				2)	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				3)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				4)	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				5)	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				6)	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan perdes yang dibuat

				7)	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				8)	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				9)	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				10)	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				11)	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				13)	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honoror Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan staf honoror
				14)	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kalurahan/Detail Engineering Drawing (DED)	Persentase Belanja operasional Kegiatan DED dan Dokumen Perencanaan
				15)	Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital (dipilih)	Persentase Belanja operasional Kegiatan SID

				17)	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
			Jumlah Sub Bidang d.			
		e.	Sub Bidang Pertanahan	1)	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				6)	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan capaian pencapain pembayaran pajak
				7)	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan (dipilih)	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan batas desa jelas
				9)	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	
				Jumlah Sub Bidang e.		
	Jumlah Per Bidang 1					

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

No	Bidang / Jenis Kegiatan					Indikator
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		
a	b	c	d	e		f
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	a.	Sub Bidang Pendidikan	1)	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				2)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Persentase Belanja operasional Kegiatan Paud Tk
				3)	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Persentase Belanja operasional Kegiatan Pendidikan
				5)	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan Sarana Prasarana Gedung dan pendukungnya
				6)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				7)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				8)	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				10)	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Persentase siswa miskin terlayani
				11)	Dukungan Relawan Pendidikan	Persentase Relawan

				14)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				<i>Jumlah Sub Bidang a.</i>		
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1)	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	Persentase Belanja operasional Kegiatan pos kesehatan
				2)	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Persentase Posyandu terlayani
				3)	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				4)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan kesiapan desa siaga
				6)	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Persentase Belanja operasional Kegiatan BKB
				8)	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Persentase Belanja operasional Kegiatan Posyandu
				9)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Persentase Belanja operasional Kegiatan Posyandu
				10)	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	Persentase Belanja operasional Kegiatan Posbindu
				11)	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				12)	Pembinaan Kampung KB	Persentase Belanja operasional Kegiatan Kampung KB
				13)	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	Persentase Belanja operasional Kegiatan dan bebas inklusif
				14)	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	Persentase Balita
				15)	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	Persentase Ibu hamil bebas kekuragn gizi
				16)	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	Persentase PSN

				17)	Pembinaan Pramurukti Wreda	Persentase Belanja operasional Kegiatan Parmukti werda
				18)	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Persentase Posyandu remaja
				19)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				<i>Jumlah Sub Bidang b.</i>		
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1)	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	Persentase Jalan
				2)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Persentase Jalan
				3)	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Jalan
				5)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Persentase Jalan
				6)	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahana/Balai Kemasyarakatan	Persentase Gedung
				8)	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan	Persentase Belanja operasional Kegiatan
				9)	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Kalurahan	Persentase Batas Desa
				10)	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan	Persentase Jalan
				11)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Persentase Jalan
				12)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Persentase Jalan
				14)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Persentase Jalan
				17)	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan (Dipilih)	Persentase Peta wilayah Sosial
				18)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan	Persentase Tata Ruang
				19)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			20)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (Dipilih)**	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			21)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			22)	Pembangunan/Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			23)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			<i>Jumlah Sub Bidang c.</i>		
		d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1)	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			2)	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			3)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			4)	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			9)	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			10)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			11)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			12)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			14)	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			15)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			17)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan (dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan	
			18)	Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan	
			20)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan	
			Jumlah Sub Bidang d.			
		e.	Sub Bidang Kehutanan & Lingk. Hidup	4)	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			Jumlah Sub Bidang e.			
		f.	Sub Bidang Perhubungan, komunikasi & Informatika	1)	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				2)	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				4)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan (dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				<i>Jumlah Sub Bidang f.</i>		
		h.	Sub Bidang Pariwisata	1)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				4)	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>						

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No	Bidang / Jenis Kegiatan					Indikator
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	a.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, &	1)	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			Perlindungan Masyarakat	2)	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				4)	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				7)	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				10)	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				12)	Penguatan Desa Aman Covid-19	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				14)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				<i>Jumlah Sub Bidang a.</i>		
		b.	Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan	1)	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				2)	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan (Dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Pembinaan Bidang Keagamaan	Persentase Serapan Belanja

						operasional Kegiatan
				7)	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				8)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang b.		
		c.	Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga	1)	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				2)	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				4)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				5)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan		
				6)	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan Kapasitas		
				7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan		
					Jumlah Sub Bidang c.			
				d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2)	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
						3)	Pembinaan PKK	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
						4)	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				5)	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang d.		
Jumlah Per Bidang 3						

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Bidang / Jenis Kegiatan					Indikator
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Sub Bidang Kelautan & Perikanan	7)	Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	Persentase Kelompok usaha
				8)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang a.		
		b.	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	1)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			4)	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			5)	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			6)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			7)	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			8)	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			9)	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			12)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			<i>Jumlah Sub Bidang b.</i>		
	c.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1)	Peningkatan Kapasitas Lurah	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			2)	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			3)	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			4)	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			5)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Persentase Serapan Belanja operasional

				Kegiatan
		<i>Jumlah Sub Bidang c.</i>		Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
d.	Sub Bidang Pemberdayaan Peremp, Perlindungan Anak & Keluarga	1)	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		2)	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		3)	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		4)	Pendataan Warga difabel (Penyandang Disabilitas)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				5)	Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				6)	Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				7)	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				8)	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga (dipilih)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				9)	Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin	Persentase Remaja Usia Kawin
				10)	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

			11)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			<i>Jumlah Sub Bidang d.</i>		
	e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			2)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			3)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			4)	Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
			5)	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Serapan Belanja operasional

				Kegiatan
		<i>Jumlah Sub Bidang e.</i>		Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1)	Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		2)	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		3)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		<i>Jumlah Sub Bidang f.</i>		
g.	Sub Bidang Perdagangan & Perindustrian	1)	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				2)	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				4)	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang g.		
Jumlah Per Bidang 4						

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN

No	Bidang / Jenis Kegiatan					Indikator
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan		
a	b	c	d	e		f
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1)	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang a.		Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1)	Penanganan Keadaan Darurat	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang b.		
		c.	Sub Bidang keadaan Mendesak	1)	Penanganan Keadaan Mendesak	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				2)	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				3)	Bantuan Bahan Pangan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan

				4)	Bantuan Pendidikan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				5)	Bantuan Pengobatan	Persentase Serapan Belanja operasional Kegiatan
				Jumlah Sub Bidang c.		
Jumlah Per Bidang 5						

Dalam pelaksanaannya, RPJMKal Kalurahan Caturharjo ini akan dijabarkan didalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Kalurahan yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

BAB IX

PENUTUP

Dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga/masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Oleh karena itu setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Lurah Kalurahan yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh satuan kerja perangkat Kalurahan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dalam enam tahun mendatang.

RPJMKal merupakan perencanaan tingkat Kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJMKal secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama 6 (enam) tahun. Seluruh komponen masyarakat Kalurahan Caturharjo, Pemerintah Kalurahan Caturharjo dan swasta (pihak ketiga) harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Kalurahan Caturharjo yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya seluruh komponen masyarakat Kalurahan Caturharjo, Pemerintah Kalurahan Caturharjo, swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama enam tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMKal.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Caturharjo sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi. Demikian RPJMKal Kalurahan Caturharjo ini disusun untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kalurahan.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2021 - 2026**

KALURAHAN : CATURHARJO
KAPANEWON : PANDAK
KAB. : BANTUL
PROV. : D. I. YOGYAKARTA

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (Desa/ RT/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya & Sum- ber Biaya		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Jumlah (Rp)	Sum-ber	Swakelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga	
							1	2	3	4	5	6						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1.	BIDANG PENYELENGGA RAN PEMERINTAHAN N KALURAHAN	a. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)	1)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			2)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			3)	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			4)	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			5)	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			6)	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			7)	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	2 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			8)	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			9)	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			10)	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	PAD/PBH	v		
			11)	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	-	0	PBH	v		
	Jumlah Sub Bidang a.												0					
		b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1)	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			2)	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			3)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
			4)	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
	Jumlah Sub Bidang b.							-	-	-	-	-	-	-				
		c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
			2)	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	2 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		PBH/ADD	v		

		3)	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		PAD	v		
		4)	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
		5)	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Kalurahan	3 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		DD	v		
		6)	Pendataan/Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan (dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		DD	v		
		8)	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Pedukuhan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		DD	v		
		9)	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		DD	v		
		10)	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik dan Kearsipan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
		Jumlah Sub Bidang c.					-	-	-	-	-	-	-				
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Kalurahan	2 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	0	ADD	v		
		2)	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Kalurahan	3 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		3)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Kalurahan	2 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		4)	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	3 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		5)	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		6)	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	3 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		7)	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	2 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		8)	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		9)	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		10)	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	-	v	-	-	-	-	-	ADD	v		
		11)	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	-	-	v	-	-	-	-	ADD	v		
		13)	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	-	v	-	-	-	-	-	ADD	v		

				14)	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kalurahan/Detail Engineering Drawing (DED)	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	-	-	-	-	-	DD	v		v		
				15)	Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital (dipilih)	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan		v	v	v	v	v	-	DD	v				
				17)	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		ADD	v				
				Jumlah Sub Bidang d.					-	-	-	-	-	-	-						
			e.	Sub Bidang Pertanahan	1)	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v			
					6)	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan	12 Bulan	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		PBH	v			
					7)	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan (dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		Dana Is	v			
					9)	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Kalurahan	1 Paket	Pemerintahan	v	v	v	v	v	v		Dana Is	v			
					Jumlah Sub Bidang e.					-	-	-	-	-	-	-	-				
					Jumlah Per Bidang 1									-	-	-	-	-	-	-	-

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	a.	Sub Bidang Pendidikan	1)	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				2)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				3)	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				5)	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				6)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Kalurahan	1 paket	Masyarakat		v	v	v	v	v		DD	v		
				7)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
				8)	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				10)	Dukungan Pendidikan bagi Siswa	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				11)	Dukungan Relawan Pendidikan	Kalurahan	1 paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	ADD, PBH	v		
				14)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang	Kalurahan	1 paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	ADD, PBH	v		
				Jumlah Sub Bidang a.					-	-	-	-	-	-	-	-			
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1)	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				2)	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat		v	v	v	v	v	-	DD	v		
				3)	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
				4)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				6)	Pengasuhan Bersama atau Bina	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				8)	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				9)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				10)	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				11)	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
				12)	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		

		13)	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		14)	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		15)	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		16)	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		17)	Pembinaan Pramurukti Wreda	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		18)	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		19)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		Jumlah Sub Bidang b.					-	-	-	-	-	-	-				
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1)	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		2)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dusun	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		3)	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		5)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		6)	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PBH, PAD	v		
		8)	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		9)	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas	Batas Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		10)	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	BKK/P2M	v		
		11)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	BKK/P2M D/DD	v		
		12)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	BKK/P2M	v		
		14)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	BKK/P2M	v		
		16)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat							-		v		
		17)	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		18)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		19)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		20)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (Dipilih)**	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Lain	v		
		21)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		22)	Pembangunan/Pengembangan Kawasan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		23)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Lain	v		
		Jumlah Sub Bidang c.					-	-	-	-	-	-	-				
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1)	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Dusun	25 Kegiatan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		2)	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PAD	v		
		3)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air,	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		4)	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Dusun	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		9)	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		10)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Dusun	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		

3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		11)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			12)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			13)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)		1 Paket	Masyarakat							-		v		
			14)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,	Dusun	5 Kegiatan	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			15)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			17)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			18)	Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			20)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			Jumlah Sub Bidang d.					-	-	-	-	-	-	-				
		e. Sub Bidang Kehutanan & Lingk. Hidup	4)	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			5)	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			6)	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			Jumlah Sub Bidang e.					-	-	-	-	-	-	-				
		f. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi & Informatika	1)	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		PAD	v		
			2)	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			3)	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			4)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
			5)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan (dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
			6)	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		DD	v		
			Jumlah Sub Bidang f.					-	-	-	-	-	-	-				
		h. Sub Bidang Pariwisata	1)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			3)	Pengembangan Pariwisata Tingkat	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			4)	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			Jumlah Per Bidang 2					-	-	-	-	-	-	-				-
		a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	1)	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	Dusun	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PBH	v		
			2)	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		ADD	v		
			3)	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v		ADD	v		

		4)	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		5)	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		6)	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		7)	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		10)	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		12)	Penguatan Desa Aman Covid-19	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	-	-	-	-	DD	v		
		14)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		Jumlah Sub Bidang a.					-	-	-	-	-	-	-				
b.	Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan	1)	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		2)	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PBH	v		
		3)	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PBH	v		
		5)	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		6)	Pembinaan Bidang Keagamaan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PBH	v		
		7)	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		8)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
		Jumlah Sub Bidang b.					-	-	-	-	-	-	-				
c.	Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga	1)	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	PAD	v		
		2)	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		3)	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	ADD	v		
		4)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
		5)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		

			6)	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			7)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
				Jumlah Sub Bidang c.						-	-	-	-	-				
	d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2)	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			3)	Pembinaan PKK	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			4)	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	DD	v		
			5)	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
			6)	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-	Dana Is	v		
				Jumlah Sub Bidang d.						-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Per Bidang 3								-	-	-	-	-	-	-			-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Sub Bidang Kelautan & Perikanan	7)	Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v	
				8)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v	
				Jumlah Sub Bidang a.						-	-	-	-	-	-			
		b.	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	1)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				3)	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				4)	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				5)	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				6)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				7)	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				8)	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				9)	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
				12)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v	
						Jumlah Sub Bidang b.						-	-	-	-	-	-	
		c.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1)	Peningkatan Kapasitas Lurah	Kalurahan	1 Kegiatan	Pemerintah	v	v	v	v	v	v			v	
2)	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan			Kalurahan	1 Kegiatan	Pemerintah	v	v	v	v	v	v			v			

		3)	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Kalurahan	1 Kegiatan	Pemerintah	v	v	v	v	v	v			v		
		4)	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat	Kalurahan	1 Kegiatan	Pemerintah	v	v	v	v	v	v			v		
		5)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kalurahan	1 Kegiatan	Pemerintah	v	v	v	v	v	v			v		
		Jumlah Sub Bidang c.					-	-	-	-	-	-	-	-			
d.	Sub Bidang Pemberdayaan Peremp, Perlindungan Anak & Keluarga	1)	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		2)	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		3)	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		4)	Pendataan Warga difabel (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		5)	Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		6)	Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		7)	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kalurahan	100 Orang	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		8)	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga (dipilih)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		9)	Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		10)	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		11)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		
		Jumlah Sub Bidang d.					-	-	-	-	-	-	-	-			
e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v		
		2)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v		
		3)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v		
		4)	Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v		
		5)	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v			v		
		Jumlah Sub Bidang e.					-	-	-	-	-	-	-	-			
f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1)	Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	-		v		

			2)	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v			v		
			3)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v			v		
			Jumlah Sub Bidang f.					-	-	-	-	-	-				
		g.	Sub Bidang Perdagangan & Perindustrian	1)	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	-	v		
				2)	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	-	v		
				3)	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	-	v		
				4)	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Penda mpingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	-	v		
				5)	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	-	v		
			Jumlah Sub Bidang g.					-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah Per Bidang 4								-	-	-	-	-	-	-			
5	BIDANG PENANGGULA NGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	a.	Sub Bidang Penanggulan g n Bencana	1)	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	-	PAD/PBH	v	
			Jumlah Sub Bidang a.											-			
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1)	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	-	PAD/PBH	v	
			Jumlah Sub Bidang b.											-			
		c.	Sub Bidang keadaan Mendesak	1)	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	-	PAD/PBH	v	
				2)	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat	V	-	-	-	-	-	DD	v	
				3)	Bantuan Bahan Pangan				-	-	-	-	-	-	-		
				4)	Bantuan Pendidikan				-	-	-	-	-	-	-		
				5)	Bantuan Pengobatan				-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Sub Bidang c.											-			
Jumlah Per Bidang 5														-			

Mengetahui :
Lurah Desa,

H. WASDIYANTO, S.SI

Caturharjo, Februari 2021
Disusun oleh
Tim Penyusun RPJM Kalurahan

DIMAS SATRIO WIBOWO, S.KEL.,MM.